

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan langkah yang tepat untuk menjamin kepastian hukum akan kepemilikan tanah. Salah satu objek pendaftaran tanah adalah tanah yang dikuasai pemerintah daerah, yang disebut tanah aset pemerintah daerah. Salah satu tanah aset pemerintah daerah yang dapat disertipikatkan adalah tanah yang dipergunakan sebagai jalan. Pendaftaran tanah untuk jalan mulai dilakukan Kabupaten Sragen pada tahun 2021. Jalan yang disertipikatan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan dilakukannya pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian jika ada perubahan nama, ukuran dan status jalan setelah dilakukan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini bahwa pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen dilakukan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum, memastikan data ukuran jalan, dan rekomendasi KPK. Ketiga alasan tersebut pada intinya dimaksudkan untuk mengamankan aset berupa jalan yang berada dibawah penguasaan Pemkab Sragen. Akibat hukum yang ditimbulkan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen adalah kepastian hukum; perlindungan hukum; dan timbulnya kewenangan, hak, kewajiban serta larangan bagi Pemkab Sragen. Pensertipikatan aset berupa jalan di Kabupaten Sragen mencerminkan pengamanan aset jalan secara nyata. Penyelesaian apabila terjadi perubahan nama, ukuran dan status jalan adalah mengajukan permohonan perubahan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan setempat untuk mengurangi potensi sengketa dikemudian hari. Pendaftaran perubahan data tersebut mencerminkan pengamanan aset jalan secara berkelanjutan.

Kata kunci : *Pendaftaran tanah, jalan, pengamanan, aset pemerintah daerah, Kabupaten Sragen.*

ABSTRACT

Land registration is the right step to ensure legal certainty of land ownership. One object of land registration is land owned by the local government, which is called land owned by the local government. One of the local government land assets that can be certified is land used as a road. Land registration for roads will begin in Sragen Regency in 2021. The roads that are certified are regency roads and neighborhood roads in several sub-districts in Sragen Regency.

The purpose of this research is to find out and analyze the reasons for carrying out land registration for roads in order to safeguard local government assets in Sragen Regency, to find out and analyze the legal consequences of land registration for roads in order to secure local government assets in Sragen Regency, and to find out and analyzing the settlement if there is a change in the name, size and status of the road after land registration for the road is carried out in the framework of securing local government assets in Sragen Regency.

The approach method used in this study is an empirical juridical approach. The specification of this research is descriptive analytical. The types and sources of data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study.

The results of this research are that land registration for roads in the context of securing local government assets in Sragen Regency is carried out for reasons of obtaining legal certainty, ensuring road size data, and KPK recommendations. These three reasons are basically intended to secure assets in the form of roads which are under the control of the Sragen Regency Government. The legal consequences arising from land registration for roads in the context of safeguarding local government assets in Sragen Regency are legal certainty; legal protection; and emergence of authorities, rights, obligations and prohibitions for Pemkab Sragen. Asset certification in the form of roads in Sragen Regency reflects the real security of road assets. The solution in the event of a change in the name, size and status of the road is to submit an application for a change in physical data and juridical data at the local Land Office to reduce potential disputes in the future. Registration of data changes reflects the ongoing safeguarding of road assets.

Keywords: *Land registration, roads, security, local government assets, Sragen Regency.*